
ANALISIS PERKEMBANGAN PRAKTIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Ibnu Aithan¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³, Hendra Naldi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang

E-mail: ibnuaitan25@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of decentralization and regional autonomy policies in Indonesia. Decentralization is intended to explore local potential, allowing regions to manage human and natural resources independently and efficiently. In addition, decentralization reduces the dominance of the central government, encourages a participatory and democratic governance system, and improves the socio-economic conditions of the region. Using a qualitative descriptive approach, this article evaluates the development of decentralization policies, their impact on regional autonomy, and the obstacles and opportunities faced. The research findings show that decentralization provides broader authority to regions in managing policies and resources according to local needs. However, a number of challenges such as inter-regional disparities, limited capacity of regional apparatus, and lack of community participation are still obstacles. This study is expected to deepen understanding of the dynamics of decentralization in Indonesia and provide relevant policy input to strengthen more effective and accountable regional governance.

Keywords: Decentralization, Regional Autonomy, Public Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi ditujukan untuk menggali potensi lokal, memungkinkan daerah mengelola sumber daya manusia dan alam secara mandiri serta efisien. Selain itu, desentralisasi mengurangi dominasi pemerintah pusat, mendorong sistem pemerintahan yang partisipatif dan demokratis, serta meningkatkan kondisi sosial-ekonomi wilayah. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini mengevaluasi perkembangan kebijakan desentralisasi, dampaknya terhadap otonomi daerah, serta hambatan dan peluang yang dihadapi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti ketimpangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas aparatur daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. Studi ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman tentang dinamika desentralisasi di Indonesia dan memberikan masukan kebijakan yang relevan guna memperkuat tata kelola daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi di Indonesia telah muncul sejak masa kemerdekaan, ditandai dengan diberlakukannya sejumlah undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1945 dan perubahan-perubahan berikutnya yang terus berkembang dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Esensi utama dari desentralisasi adalah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pusat, dan menciptakan tata kelola yang lebih demokratis. Sistem ini juga mendorong partisipasi publik serta mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi. Kendati demikian, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketimpangan pembangunan antar daerah, kapasitas aparatur yang belum merata, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Tujuan dibentuknya desentralisasi sendiri adalah Untuk dapat mengembangkan potensi daerah (Juanda et al., 2023), artinya daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan cepat dan tepat (Suriadi et al., 2024). Mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat, hal ini didasarkan agar daerah memiliki potensi sendiri dalam mengurus daerahnya, atau untuk menghindari pemerintahan yang bersifat otoriter. Menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis (Juanda et al., 2023), yang artinya masyarakat juga dapat ikut serta dalam mengurus urusan pemerintahan daerah dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada sentralisasi, Untuk memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi daerah, dimana dengan sistem pemerintahan yang seperti ini daerah dapat memiliki kreativitas untuk melakukan berbagai cara

dan upaya agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik (Rutmita & Silalahi, 2024). Berbagai tujuan diterapkan desentralisasi ini diharapkan agar dapat dijalankan oleh pemerintah dan juga dengan adanya koordinasi dari warga masyarakat. Karena tujuan yang sebenarnya dari kebijakan dalam desentralisasi ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Azan et al., 2021). Sebab dengan kebijakan Desentralisasi ini pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengurus daerahnya masing-masing. Serta pemerintah daerah juga dapat bertindak dalam memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan dan kebutuhan masyarakat dalam daerah. Dalam desentralisasi pengambilan keputusannya akan lebih berpartisipasi aktif ketimbang harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat, dimana dengan hal ini demokrasi akan lebih cepat berkembang karena pemerintah di berikan ruang untuk berkreasi berinovasi serta memiliki kreativitas dan ciri khas daerah masing-masing (M. N. H. Sari et al., 2024). Namun dalam proses pelaksanaan Desentralisasi yang sudah berlangsung sangat lama di Indonesia ini, tidak jarang ditemukan hambatan-hambatan yang malah membuat pelaksanaan Desentralisasi tidak mengalami kemajuan sama sekali atau malah mengalami kemunduran. Beberapa hambatan ini bukan hanya datang dari pemerintahan itu sendiri melainkan justru juga datang dari masyarakat.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Periode	Fokus Utama Kebijakan Desentralisasi	Landasan Hukum Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target/Tren yang diharapkan
Masa Orde Lama (1945-1965)	Sentralisasi Kuat dengan Otonomi Terbatas	UUD 1945 (Awal), UU No.1 Tahun 1957, UU No.18 Tahun 1965	Tingkat Keterlibatan Daerah Dalam Pembangunan Nasional	Kualitatif (Rendah, Sedang, Tinggi)	Peningkatan Partisipasi Daerah Secara Terbatas
			Tingkat Ketergantungan Daerah Pada Pemerintah Pusat (pendanaan)	Persen (%)	Penurunan Ketergantungan Secara Bertahap
Masa Orde Baru (1966-1998)	Desentralisasi Terbatas dalam Kerangka Sentralisasi	UUD 1945, UU No.5 Tahun 1974	Tingkat Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah	Persen (%)	Implementasi yang Efektif dan Seragam di Seluruh Daerah
			Tingkat Keseimbangan Pembangunan antar Daerah	Indeks Rasio (Keseimbangan Ekonomi)	Pengurangan Kesenjangan Pembangunan
			Kepatuhan Daerah Terhadap Regulasi Pusat	Persen (%)	Tingkat Kepatuhan yang Tinggi
Masa Transisi dan Awal Reformasi (1998-2001)	Demokratisasi dan Peletakan Dasar Desentralisasi Luas	TAP MPR No.XV/MPR/1998, TAP MPR No.IV/MPR/1999	Proses Pembentukan Undang-Undang Desentralisasi Baru	Kualitatif (Selesai/ Belum Selesai)	Penyelesaian UU Desentralisasi yang Demokratis
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah (Awal)	Persen (%)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Masa Reformasi (2001-Sekarang)	Desentralisasi Luas dan Otonomi Daerah	UUD 1945 (Amandemen), UU No.22 Tahun 1999 (Diganti UU No.32 Tahun 2004, Terakhir diubah UU No.23 Tahun 2014), UU No.25 Tahun 1999 (diganti UU No. 33 Tahun 2004)	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen (%)	Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
			Tingkat Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan Oleh Daerah	Persen (%)	Penyelenggaraan Urusan yang Efektif dan Efisien Sesuai Standar
			Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah	Skor (Misalnya dari Survey atau Audit)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi)

Kesejahteraan Masyarakat di Daerah	Sosial Ekonomi (Misalnya IPM Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio di Tingkat Daerah)	Kesejahteraan dan Pengurangan Kesenjangan Antar Daerah
Tingkat akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Kategori Opini (WTP,WD P,dst)	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Tingkat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan daerah	Indeks/Kualitatif (Tingkat Konflik Regulasi, Sinergi Program)	Peningkatan Sinergi dan Pengurangan disharmoni Kebijakan

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode	Hasil
Tantangan Dalam Perkembangan Desentralisasi di Indonesia	Rizki Afri Mulia, Berian Hariadi, Susiyanti Meilina	2023	Tinjauan Literatur Sistematis	Subjek Penelitian Desentralisasi yang paling banyak dipilih adalah kebijakan, politik daerah, dan kebijakan daerah
Perkembangan Demokrasi di Indonesia	Adelia Nafiatul Farida, Kevin Tumanggor, Yasfa Ainun Abdullah, Dewa Gede Arya, M. Asif Nur Fauzi	2024	Deskriptif Analitis	Kompleksitas Dinamika Politik, Termasuk Perdebatan Konstitusional, krisis ekonomi, dan konflik politik yang mempengaruhi stabilitas demokrasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Perizinan Kelapa Sawit dalam rangka Menyelaraskan dengan Perlindungan Hutan Konservasi Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah	Rollys Suriani	2021	Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Perizinan Kelapa Sawit Belum Selaras dengan Perlindungan Hutan Konservasi Berkelanjutan

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Telaah Hukum Positif di Indonesia	Saputra, Gunawan	2021	Yuridis Normatif dengan Spesifikasi Penelitian Deskriptif Analisis Normatif	Kebijakan Mengenai Desa diarahkan pada Penyeragaman bentuk dan Susunan Pemerintah Desa dengan Corak Nasional
Fenomena Politik Dinasti Sebagai Tantangan Bagi Sistem Demokrasi di Indonesia	Emilianus Indra	2023	Deskriptif Kualitatif	Pada Umumnya Perkembangan Politik Dinasti di Negara-Negara yang Menganut Sistem Demokrasi Sangat Berbeda dengan Negara yang tidak Menganut Sistem Demokrasi
Urgensi Penataan Ulang Konsep Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	MA Fauzani	2020	Pendekatan Penelitian Peraturan Perundang-undangan	Pengkakuan terhadap Desentralisasi Asimetris Mengalami Pasang Surut dalam Konstitusi Indonesia
Politik Hukum Desa Berbasis	Yamani, M	2022	Pendekatan Penelitian	materi kewenangan
Desentralisasi Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia			Peraturan Perundang-undangan	lokal berskala desa dapat ditingkatkan dengan menghilangkan materi yang tumpang tindih dengan kewenangan daerah supra desa
Kedudukan dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi Asimetris di Indonesia	Jeffry Raynold Wayne	2022	Pendekatan Penelitian Peraturan Perundang-undangan	kedudukan MRP adalah lembaga sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan sangat terbatas

1. Pengertian Desentralisasi.

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang mengandung arti

pemisahan dari pusat. Dalam praktiknya, desentralisasi dapat dilihat sebagai strategi untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dan mendorong efisiensi serta responsivitas kebijakan di tingkat lokal.

2. Pengertian Menurut Para Ahli.

Adapun pengertian desentralisasi menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

- Menurut Syamsudin Haris (2006).
 - Menurut Vincent Ostrom dalam Syamsudin Haris (2006), jika desentralisasi dipahami berdasarkan perspektif state society relation, maka akan diketahui bahwa sejatinya keberadaan dari desentralisasi tak lain yaitu untuk mendekatkan negara kepada masyarakat dengan sedemikian rupa sehingga di antara keduanya dapat melahirkan sebuah interaksi yang dinamis, baik terhadap proses pengambilan keputusan maupun dalam mengimplementasikan kebijakan.
- Menurut Bambang Yudoyono (2003).
 - Sejalan dengan hal itu, Joseph Riwu Kaho (1991) dalam Bambang Yudoyono (2003) mengemukakan alasan-alasan mengapa pemerintah perlu melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap pemerintah daerah.
 - Alasan-alasan itu didasarkan pada keadaan ideal yang diinginkan sekaligus memberikan landasan filosofis untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

- dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara.
- Menurut Henry Maddick (1963).
 - Henry Maddick, menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum guna menangani bidang-bidang/ fungsi-fungsi tertentu terhadap daerah otonom.
 - Menurut Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983).
 - Rondinelli, Nellis, dan Cheema (1983), menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat.
 - Menurut Rondinelli (1983).
 - Rondinelli (1983), desentralisasi merupakan penyerahan, perencanaan, pembuatan keputusan, serta kewenangan administratif dari pemerintah pusat terhadap organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.
3. Bentuk Desentralisasi.
- Adapun berbagai bentuk kegiatan utama penerapan desentralisasi. Hal itu berguna untuk membedakan berbagai konsep tersebut, untuk melihat berbagai konsep dimensi dari tipe pemerintahan ini. Berikut ini adalah beberapa bentuk yang pernah dipraktekkan pemerintah dari berbagai negara:
- Dekonsentrasi Wewenang Administratif
 - Dekonsentrasi yang dimaksud tersebut, adalah tidak mengaitkan penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan dalam membuat keputusan, saat terdapatnya pergeseran pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah-daerah (Hido, 2022).
 - Delegasi Terhadap Penguasa Otoritas
 - Delegasi yang dimaksud ini, merupakan penyerahan tugas-tugas khusus terhadap suatu organisasi yang secara langsung berada dibawah pengawasan pusat, dimana sebelumnya telah dilimpahkan pengambilan keputusan, dan kewenangan manajerialnya (N. Sari & Yanti, 2022).
 - Devolusi Terhadap Pemerintah Daerah
 - Beberapa fungsi tertentu dilakukan secara mandiri oleh unit-unit yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Dimana kondisi itu mengacu pada pemerintah pusat yang mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen. Itulah yang dinamakan dengan nama devolusi terhadap pemerintah daerah (Asnawi & Andrizal, 2021).
 - Pemindahan Fungsi dari Pemerintah Kepada Swasta
 - Hal itu biasa dikenal dengan nama privatisasi, yang memiliki arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan Dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab tertentu diserahkan otoriter dan kekuasaannya kepada organisasi swasta (Maharani, n.d.).



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika desentralisasi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk menggali pemahaman dari berbagai perspektif. Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pendekatan triangulasi dan verifikasi melalui diskusi dan pengecekan ulang kepada partisipan untuk menjaga validitas hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena atau kasus tertentu sebagaimana adanya, tanpa adanya manipulasi atau perbandingan antar kelompok (Roosinda et al., 2021). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai pengalaman, persepsi, makna, dan konteks yang melingkupi fenomena yang diteliti.

- Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, berbagai teknik pengumpulan data dapat digunakan secara tunggal maupun kombinasi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif (Roosinda et al., 2021). Berikut adalah beberapa teknik yang relevan:

- Studi Dokumen (Document Study)
- Deskripsi: Studi dokumen melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian (Safarudin et al., 2023). Dokumen dapat berupa catatan resmi, surat, laporan, memo, agenda, transkrip, media massa, buku harian, foto, video, dan materi digital lainnya.
- Tujuan: Untuk memperoleh informasi kontekstual, historis, atau deskriptif yang dapat memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.
- Analisis Isi Dokumen: Isi dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema, pola, tren, atau informasi spesifik yang relevan dengan fokus penelitian (Arif & Oktafiana, 2023).
- Fokus Group Discussion (FGD)
- Deskripsi: FGD merupakan diskusi kelompok yang terarah dan dipandu oleh seorang moderator. Kelompok diskusi terdiri dari beberapa partisipan yang memiliki karakteristik relevan dengan fokus penelitian (suci Sukmawati et al., 2023).
- Tujuan: Untuk menggali berbagai perspektif, pengalaman, dan opini mengenai suatu isu atau topik melalui interaksi dan diskusi antar partisipan.
- Proses:
- Penyusunan Panduan Diskusi: Moderator menyusun panduan

-
- diskusi yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dibahas.
 - Pemilihan Partisipan: Partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.
 - Pelaksanaan Diskusi: Moderator memfasilitasi diskusi agar berjalan lancar, semua partisipan memiliki kesempatan untuk berbicara, dan topik yang relevan dibahas secara mendalam.
 - Pencatatan Data: Diskusi biasanya direkam menggunakan alat perekam audio atau video (dengan izin partisipan). Catatan lapangan juga penting untuk merekam dinamika kelompok, ekspresi non-verbal, dan poin-poin penting yang muncul selama diskusi.
 - Teknik Analisis Data
 - Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif bersifat induktif dan iterative. Proses analisis dimulai sejak pengumpulan data pertama dan berlanjut hingga seluruh data terkumpul dan peneliti mencapai pemahaman yang mendalam (Ramdhan, 2021). Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan:
 - Reduksi Data (Data Reduction)
 - Deskripsi: Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang terkumpul di lapangan. Proses ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan menghilangkan data yang tidak relevan.
 - Proses:
 - Pembuatan Ringkasan: Meringkas catatan lapangan, transkrip wawancara, atau dokumen-dokumen penting .
 - Pemilihan Tema: Mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari kode-kode awal. Tema merupakan unit makna yang berulang, signifikan, dan relevan dengan pertanyaan penelitian.
 - Penyajian Data (Data Display)
 - Deskripsi: Penyajian data adalah proses mengorganisasikan dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami (Muti & Nuraeni, 2023). Penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, grafik, bagan, matriks, atau diagram.
 - Tujuan: Untuk memudahkan peneliti melihat pola-pola, hubungan, dan perbedaan dalam data, serta untuk menarik kesimpulan yang valid.
 - Contoh:
 - Matriks: Menampilkan data dari berbagai partisipan atau sumber data berdasarkan tema-tema tertentu untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi .
 - Bagan Alur: Menggambarkan proses atau tahapan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul.
 - Deskripsi Naratif: Menyajikan temuan penelitian dalam bentuk uraian yang detail dan mendalam, dilengkapi dengan kutipan-kutipan langsung dari partisipan atau dokumen untuk mendukung interpretasi (Hasan et al., 2025).
 - Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) (Azhari et al., 2023)

- Deskripsi: Penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi terhadap pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Verifikasi merupakan proses untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik didukung oleh data dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Proses:
- Interpretasi: Peneliti mencari makna dan signifikansi dari pola-pola dan tema-tema yang telah diidentifikasi. Interpretasi harus didasarkan pada data yang ada dan dihubungkan dengan konteks penelitian serta teori yang relevan.
- Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (misalnya, wawancara, observasi, dokumen) atau metode pengumpulan data untuk memvalidasi temuan. Jika informasi dari berbagai sumber mendukung kesimpulan yang sama, maka kredibilitas temuan akan meningkat (Agusven et al., 2023).
- Member Check: Meminta partisipan untuk meninjau dan memberikan umpan balik terhadap interpretasi dan kesimpulan peneliti. Ini membantu memastikan bahwa interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan pengalaman partisipan.
- Diskusi dengan Kolega: Mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan peneliti lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan meningkatkan objektivitas.
- Audit Trail: Mendokumentasikan secara rinci seluruh proses penelitian, mulai dari

pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi. Ini memungkinkan peneliti lain untuk menelusuri dan mengevaluasi kredibilitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan ego sektoral antar daerah yang menghambat kolaborasi lintas wilayah. Di sisi lain, muncul praktik penyalahgunaan wewenang dan kepentingan politik lokal yang menghambat transparansi. Fenomena pemekaran wilayah yang masif juga memberi tekanan pada anggaran negara. Dari sisi masyarakat, rendahnya kepercayaan publik terhadap kebijakan dan minimnya partisipasi aktif menjadi tantangan tersendiri. Namun, desentralisasi juga membawa manfaat positif, seperti peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta perumusan kebijakan terpadu yang mengakomodasi keragaman antar wilayah.

- Kewenangan yang diambil oleh pemerintah daerah sering kali hanya mementingkan daerah yang di pimpinya, sehingga koordinasi atau kerjasama satu daerah dengan daerah lain sulit untuk dilakukan, sering kali daerah hanya menonjolkan ego dari daerah masing-masing sehingga yang membuat kerja sama daerah menjadi sempit. Rumitnya pengelolaan antara hubungan daerah dengan antar daerah, hal ini sebabkan karena pengambilan kewenangan tadi yang hanya mementingkan daerah yang dipimpin.
- Terdapat kerjasama elit dan pengusaha yang hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengeksploitasi

daerah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat atau yang dapat mengganggu fasilitas umum. Sering terjadi politik kepentingan, sebab kecendrungan politik lokal disuatu daerah masih berlaku, sehingga politik lokal yang menganut sistem oligarki kekuasaan akan dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi di daerah. Pelaksanaan desentralisasi sering kali diwarnai dengan ajang untuk melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) bagi para pejabat birokrasi, seperti dalam pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota misalnya tidak jarang para pejabat dalam birokrasi pemerintahan menggunakan cara-cara yang tidak benar agar mereka mendapatkan kursi dalam kepemimpinan. Pemekaran daerah, dimana terhitung sampai tahun 2021 saja terdapat daerah otonomi sebanyak 529 daerah yang terdiri atas 34 Provinsi, 402 Kabupaten Dan 93 Kota. Maraknya pemekaran daerah ini juga turut membebani anggaran negara. Akibatnya beban APBN menjadi bertambah yang akan dapat mengurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada daerah Desentralisasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Selain beberapa hambatan diatas, juga terdapat hambatan yang muncul dari masyarakat sering kali kita sebagai anggota masyarakat menilai bahwa program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak konsisten. Hal ini biasanya bersumber dari informasi yang diterima oleh masyarakat, dimana informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Sebagai anggota masyarakat seharusnya terlebih dahulu kita mencari informasi tentang kebenaran informasi yang kita terima

jangan sampai informasi yang kita terima malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain hal tersebut kurangnya partisipasi kita sebagai anggota masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan desentralisasi. Masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan ini biasanya disebabkan karena masyarakat yang hilang kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh banyak negara untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Di Indonesia, proses desentralisasi telah menjadi bagian integral dari reformasi politik dan administrasi sejak awal 2000-an. Artikel ini akan membahas kebijakan desentralisasi di Indonesia, serta dampak dan tantangan yang dihadapinya terhadap pemerintahan daerah.

Dampak Positif Kebijakan Desentralisasi

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan adanya desentralisasi, pelayanan publik dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dan efektif.
- Pemberdayaan Masyarakat Desentralisasi memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan

pengawasan lokal meningkat, yang dapat memperkuat partisipasi demokratis.

- Pengembangan Ekonomi Lokal Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merancang dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Tantangan dan Dampak Negatif Kebijakan Desentralisasi

- Ketimpangan Regional Salah satu tantangan utama desentralisasi adalah ketimpangan antara daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Daerah yang memiliki sumber daya dan kapasitas lebih besar cenderung dapat memanfaatkan kebijakan ini lebih baik dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang.
- Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Peningkatan wewenang dan anggaran di tingkat daerah tidak selalu disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini dapat membuka peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah.
- Ketergantungan pada Transfer Dana Banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ketergantungan ini dapat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperbaiki kinerja mereka.

Langkah-Langkah untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan

desentralisasi, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- Peningkatan Kapasitas Administrasi dan Sumber Daya Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sumber daya kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan administratif.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah harus diprioritaskan untuk mengurangi risiko korupsi.
- Pengembangan Kebijakan yang Terintegrasi Kebijakan desentralisasi harus disertai dengan strategi pengembangan yang terintegrasi untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan memastikan bahwa manfaat dari desentralisasi dapat dirasakan secara merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan desentralisasi telah memberikan peluang besar bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Meskipun begitu, berbagai hambatan masih perlu dibenahi agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan efektif. Ke depan, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar tujuan utama desentralisasi, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwinarto, S. (n.d.). REFORMULASI PENGATURAN OBLIGASI DAERAH DI ERA OTONOMI

- DAERAH. *repository-penerbitlitnus.co.id*. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/431/>
- Agusven, S. T. T., Satriadi, S. A. P., Hafizni, S. E. R., & ... (2023). *Dasar metodologi penelitian kualitatif*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=oBq3EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA53%5C&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif+teknik+pengumpulan+data+teknik+analisis+data%5C&ots=pd89Vexgur%5C&sig=QXdvuQXzX8KpyCgVQ2vmyJ4QNYa>
- Ardana, Y., & Syamsiyah, N. (2023). *Perekonomian Indonesia*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=kXzEEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=sejarah+perkembangan+desentralisasi+di+indonesia%5C&ots=G5dbEnbXWf%5C&sig=_C91mFYwMUWyGYicKsCBcELTBec
- Arif, S., & Oktafiana, S. (2023). *Penelitian tindakan kelas*. repository.iainmadura.ac.id. <http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/1238>
- Asnawi, E., & Andrizal, A. (2021). *Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047>
- Azan, K., Pratama, M. T. Y., Fadhilaturrahmi, M. P., & ... (2021). *Kapita Selekta Pendidikan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=2Vo5EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=sejarah+perkembangan+desentralisasi+di+indonesia%5C&ots=d0Qp5hBv_q%5C&sig=ow7MF0LNjb5UCFzRIaaCfZNhtEU
- Azhari, M. T., Bahri, M. P. A. F., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=P7OpEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif+teknik+pengumpulan+data+teknik+analisis+data%5C&ots=efG0HYueS3%5C&sig=Kl7IBkIHNvgl2qgys6HIRtBFiV0>
- Candra, M., & MH, C. P. M. (2024). *Birokrasi dan Good Governance*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=XjH7EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=analisis+desentralisasi+pemerintah+l>

- okal+periode+reformasi+serta+%22isu+isu%22+terkini%5C&ots=5NxAM OQADn%5C&sig=LIIjARkgV9jKPCfx1UUCQGUsx1k
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., & ... (2025). *Metode penelitian kualitatif*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=OhhXEQAQAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif+teknik+pengumpulan+data+teknik+analisis+data%5C&ots=seoy9k2RsD%5C&sig=BI8IlshiiUQDmMjAsVtVXVvkq3a8>
- Hido, K. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020. *Lex Administratum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42548>
- Juanda, J., Mappa, D., & Sirajuddin, A. (2023). Peningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam Memaksimalkan Potensi Maritim. *Innovative: Journal Of Social ...*
<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3731>
- Ma'arij, A. (2020). Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan ...*
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/522>
- Maharani, A. (n.d.). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PARTISIPASI POLITIK: ANALISIS PERBANDINGAN PEMILU TAHUN 2019 DAN 2024 DI INDONESIA. *repository.uinjkt.ac.id*.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82023>
- Muti, A. S., & Nuraeni, L. (2023). Pembelajaran Daring Pada Anak Usia Dini: Meningkatkan Kemampuan Bahasa Melalui Metode Tanya Jawab. *CERIA (Cerdas Energik Responsif ...*
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/ceria/article/view/16258>
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., & ... (2024). *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=nUsHEQAQAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA55%5C&dq=analisis+desentralisasi+pemerintah>

- +lokal+periode+reformasi+serta+%22
isu+isu%22+terkini%5C&ots=MAEt
UtfEuh%5C&sig=PZSFvXoUftK_qK
95MVon888Mtfk
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*.
books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=Ntw_EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif+teknik+pengumpulan+data+teknik+analisis+data%5C&ots=f3pIaMQrcw%5C&sig=XghTT-DhJrvqsVMEu7-PAg4hpnM
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A.,
Anisah, H. U., & ... (2021). *Metode
penelitian kualitatif*.
books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=xmtgEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif+teknik+pengumpulan+data+teknik+analisis+data%5C&ots=utJkwPEIg8%5C&sig=r6XkXN797Hblt-fTSjqDSGVyHGM>
- Rutmita, E., & Silalahi, M. F. (2024).
Perkembangan Asas Desantralisasi
Pada Masa Sebelum Reformasi dan
Sesudah Reformasi. *PIJAR: Jurnal
Pendidikan dan*
<http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/pijar/article/view/618>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., &
... (2023). Penelitian kualitatif.
Innovative: Journal Of <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1536>
- Sari, M. N. H., Hawa, E., Sari, F. A., & ...
(2024). Perkembangan Pendidikan
Islam di Indonesia Pada Era Reformasi.
ISEDU: Islamic
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/ISEDU/article/view/1516>
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2022). Sejarah lokal
dan desentralisasi pendidikan di
Indonesia. *Tarikhuna: Journal of
History and History*
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tarikhuna/article/view/5650/0>
- Sopannah, A. (2023). *Perencanaan
Pembangunan Daerah Teori dan
Implementasi*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=UT6xEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=analisis+desentralisasi+pemerintah+lokal+periode+reformasi+serta+%22isu+isu%22+terkini%5C&ots=GvK2MKxE-L%5C&sig=XeDdsqs951FP5bsBxMAMCR1s1bl>

suci Sukmawati, A., Rusmayadi, G., Amalia, M. M., & ... (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data berbasis Studi Kasus.*

books.google.com.

<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=KU3MEAAAQB-AJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA23%5C&dq=metode+penelitian+deskriptif+kualitatif+teknik+pengumpulan+data+teknik+analisis+data%5C&ots=novB-VVIBy%5C&sig=H5u8jgXMAvo9QaWjxeOsiwKJPGE>

Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & ... (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal*
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/4869>

Tjandra, W. R., & SH, M. (2023). *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara.*

books.google.com.

<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=IFjyEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA5%5C&dq=analisis+desentralisasi+pemerintah+lokal+periode+reformasi+serta+%22isu+isu%22+terkini%5C&ots=AFn5Dq>

cKuu%5C&sig=tTVzEmO_RmLodiZ
hfl-oS5vtTTo